

Katalog / Catalogue BPS : 3201026.82

Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA
STATISTICS OF MALUKU UTARA PROVINCE**

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI MALUKU UTARA 2017

ISBN	:	
No. Publikasi	:	82520.1712
Katalog BPS	:	3205005.82
Ukuran Buku	:	14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	:	vii + 47 Halaman
Naskah	:	Bidang Statistik Sosial
Desain Sampul	:	Bidang IPDS
Diterbitkan Oleh	:	©BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	:	2018

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2017” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran serta profil rumah tangga miskin di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017.

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, diucapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus. Saran dan kritik dari berbagai pihak terutama dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, 8 Oktober 2018
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA



Drs. Misfaruddin, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	2
1.3. Data Yang Digunakan	2
Bab II KAJIAN LITERATUR	3
2.1. Definisi Kemiskinan	3
2.2. Pendekatan Penghitungan Kemiskinan.....	7
Bab III METODOLOGI	15
3.1. Penghitungan Kemiskinan.....	15
3.2. Indikator Kemiskinan.....	20
Bab IV ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA	22
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara.....	22
4.2. Jumlah Penduduk Miskin	24
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	26
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	28

Bab V	KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI MALUKU UTARA	31
	5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan	32
	5.2. Karakteristik Ketenagakerjaa	34
	5.3. Karakteristik Pendidikan	36
	5.4. Karakteristik Kesehatan.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	47

<https://malut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel L.1.	Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015 – 2017.....	41
Tabel L.2.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015 – 2017.....	42
Tabel L.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012 – 2017.....	43
Tabel L.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015 – 2017	44
Tabel L.5.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015 – 2017.....	45
Tabel L.6.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015 – 2017	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2013-2017	22
Gambar 4.2.	Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017	23
Gambar 4.3.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Tahun 2015-2017	24
Gambar 4.4.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2017	25
Gambar 4.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2013-2017	26
Gambar 4.6.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017	27
Gambar 4.7.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2013-2017	28
Gambar 4.8.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017	29
Gambar 5.1.	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air Layak di Maluku Utara Tahun 2017	32
Gambar 5.2.	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2017	33
Gambar 5.3.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Maluku Utara Tahun 2017	34

Gambar 5.4.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Maluku Utara Tahun 2017.....	35
Gambar 5.5.	Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Miskin di Maluku Utara Tahun 2017.....	36
Gambar 5.6.	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara 2017.....	37
Gambar 5.7.	Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Alat KB dan Memiliki Balita yang Telah Diimunisasi di Maluku Utara Tahun 2017	38

<https://malut.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, dan penyajiannya sampai level provinsi baru dimulai tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Selanjutnya mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember), BPS mulai menyajikan data kemiskinan untuk level kabupaten/kota meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2016. Analisis ini juga menyajikan karakteristik rumah tangga miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk, serta beberapa indikator kemiskinan lainnya.

1.3. Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 terdiri dari 4410 rumah tangga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Data tersebut dipergunakan untuk estimasi kemiskinan menurut kabupaten/kota serta analisis karakteristik rumah tangga miskin untuk tingkat provinsi.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Definisi Kemiskinan

2.1.1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan

relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US \$ yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.1.3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau dialihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya penduduk Maluku Utara yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.

Adapun kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang Suku Laut.

Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan, “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.2. Pendekatan Penghitungan Kemiskinan

2.2.1. Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu, kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut *United Nations* (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi

pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.

2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) *personal consumption items* yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) *basic public services* yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.
- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

2.2.2. Pendekatan Rata-rata Per Kapita

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP per kapita per hari, sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan $\frac{1}{3}$ dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor, dan barang-barang lainnya).

2.2.3. Pendekatan BKKBN

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara lengkap. Pendataan keluarga tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. BKKBN membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III-Plus).

Menurut BKKBN, kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu sebagai berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-masing.
2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih.
3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.
5. Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB, pergi ke sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Mereka yang dikategorikan sebagai Keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator di atas.

Pendekatan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga

kecil/inti. Selain itu, kelima indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

2.2.4. Pendekatan BPS Berdasarkan SPKPM 2000

Pada tahun 2000, BPS melakukan Studi Penentuan Kriteria Penduduk Miskin (SPKPM 2000) untuk mengetahui karakteristik-karakteristik rumah tangga yang mampu mencirikan kemiskinan secara konseptual (pendekatan kebutuhan dasar/garis kemiskinan). Hal ini menjadi sangat penting karena pengukuran makro (*basic needs*) tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi rumah tangga/penduduk miskin di lapangan. Informasi ini berguna untuk penentuan sasaran rumah tangga program pengentasan kemiskinan (intervensi program). Cakupan wilayah studi meliputi tujuh provinsi, yaitu Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dari hasil SPKPM 2000 tersebut, diperoleh 8 variabel yang dianggap layak dan operasional untuk penentuan rumah tangga miskin di lapangan. Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakkemiskinan. Kedelapan variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Luas Lantai Per Kapita:
 - $\leq 8 \text{ m}^2$ (skor 1)
 - $> 8 \text{ m}^2$ (skor 0)
2. Jenis Lantai:
 - Tanah (skor 1)
 - Bukan Tanah (skor 0)

3. Air Minum/Ketersediaan Air Bersih:
 - Air hujan/sumur tidak terlindung (skor 1)
 - Ledeng/PAM/sumur terlindung (skor 0)
4. Jenis Jamban/WC:
 - Tidak Ada (skor 1)
 - Bersama/Sendiri (skor 0)
5. Kepemilikan Asset:
 - Tidak Punya Asset (skor 1)
 - Punya Asset (skor 0)
6. Pendapatan (total pendapatan per bulan):
 - ≤ 350.000 (skor 1)
 - > 350.000 (skor 0)
7. Pengeluaran (persentase pengeluaran untuk makanan):
 - 80 persen + (skor 1)
 - < 80 persen (skor 0)
8. Konsumsi lauk pauk (daging, ikan, telur, ayam):
 - Tidak ada/ada, tapi tidak bervariasi (skor 1)
 - Ada, bervariasi (skor 0)

Kedelapan variabel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *stepwise logistic regression* dan misklasifikasi yang dihasilkan sekitar 17 persen. Hasil analisis deskriptif dan uji *Chi-Square* juga menunjukkan bahwa kedelapan variabel terpilih tersebut sangat terkait dengan fenomena kemiskinan dengan tingkat kepercayaan sekitar 99 persen. Skor batas yang digunakan adalah 5 (lima) yang didasarkan atas modus total skor dari domain rumah tangga miskin secara konseptual. Sehingga rumah tangga yang mempunyai minimal 5 (lima) ciri miskin, maka rumah tangga tersebut digolongkan sebagai rumah tangga miskin.

2.2.5. Pendekatan BPS Berdasarkan PSE05

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumah tangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga
13. Pendidikan kepala rumah tangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumah tangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring, di mana setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten. Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumah tangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula:

$$I_{RM} = \sum W_i X_i$$

di mana:

W_i = bobot variabel terpilih, dan $\sum W_i = 1$

X_i = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).

I_{RM} = indeks rumah tangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai I_{RM} diatas, selanjutnya semua rumah tangga diurutkan dari nilai I_{RM} terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai I_{RM} maka semakin miskin rumah tangga tersebut.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Penghitungan Kemiskinan

3.1.1. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Maret 2016 yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016.

3.1.3. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

3.1.4. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKMj tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

di mana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

GKNM_{jp} = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

- r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).
- k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.
- J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

- $\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.
- PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.
- P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau:

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

- PM_p = Penduduk miskin provinsi.
- PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.
- n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana :

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi.

<https://malut.bps.go.id>

3.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* ($HCI = P_0$), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

$\alpha = 0, 1, 2$

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1), jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2).

$z =$ Garis kemiskinan

$y_i =$ Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$

$q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n =$ Jumlah penduduk

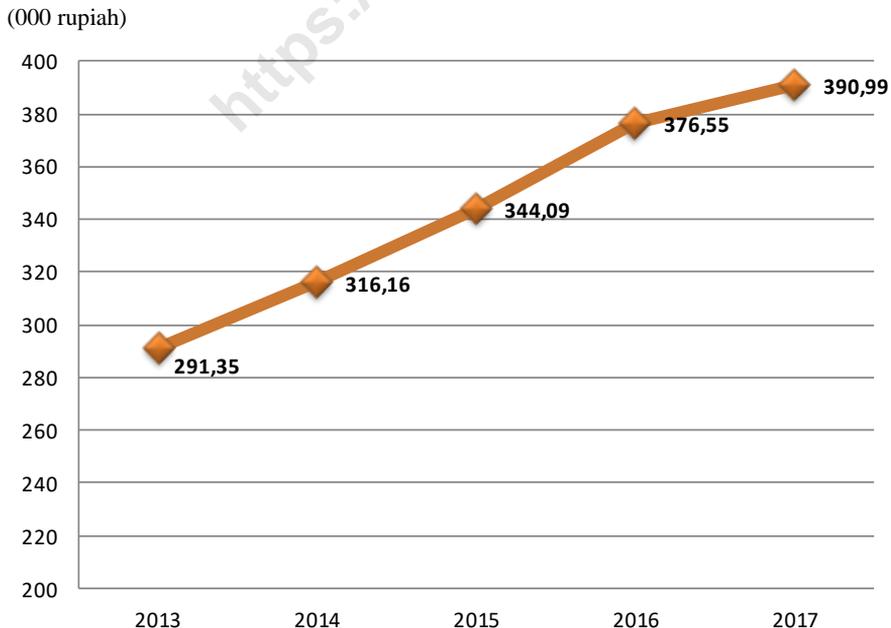
BAB IV

ULASAN TINGKAT KEMISKINAN MALUKU UTARA

4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

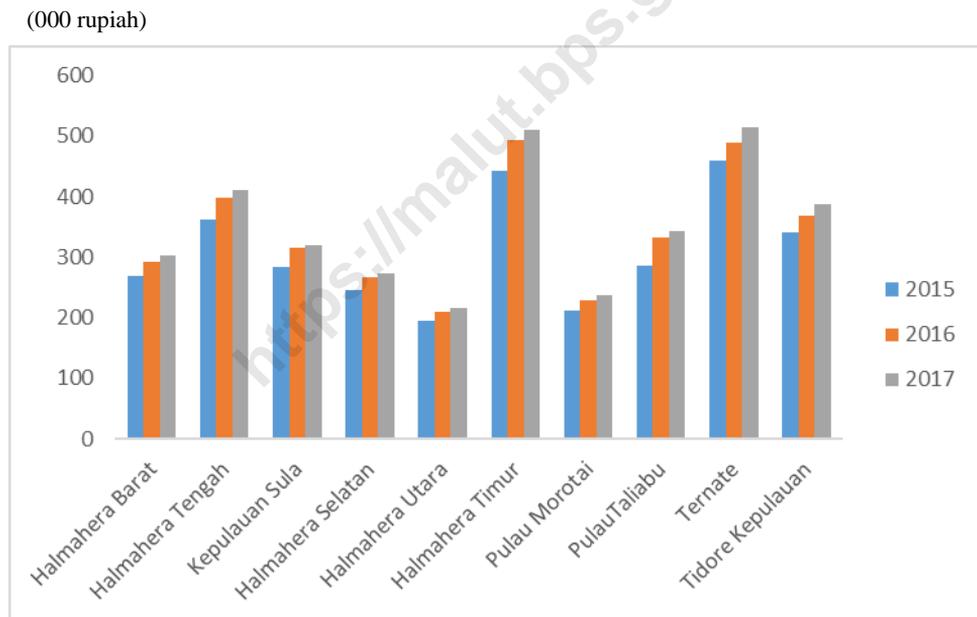
Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

**Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Maluku Utara
Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)**



Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 sebesar Rp.390.988,- naik sebesar Rp.14.433 atau 3,83 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.376.555. Kenaikan garis kemiskinan tersebut cukup tinggi jika dibandingkan kenaikan garis kemiskinan pada tahun 2016 lalu sebesar 9,43 persen.

Gambar 4.2. Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2017



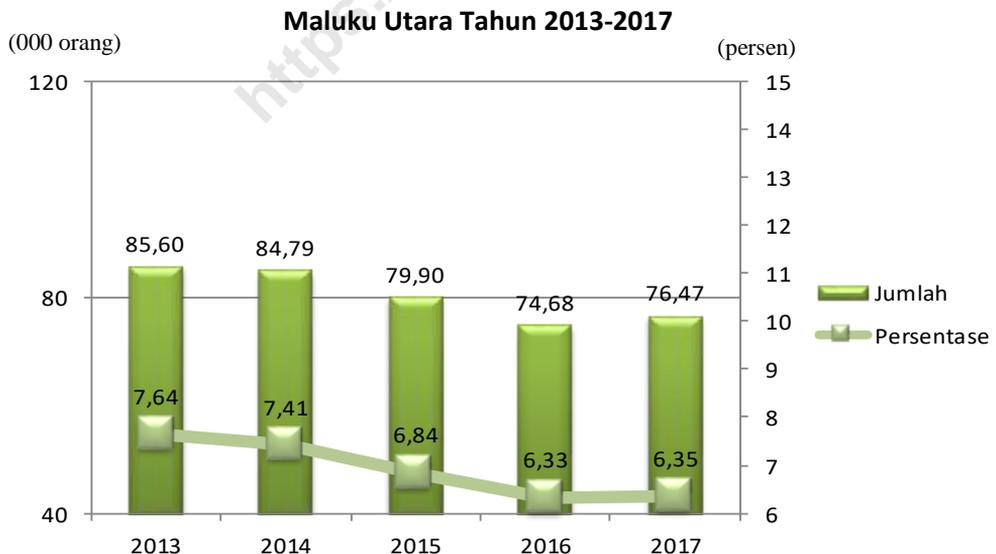
Seperti terlihat dalam Gambar 4.2, garis kemiskinan Kota Ternate pada tahun 2017 adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp.514.396. Angka tersebut sekaligus menggeser Halmahera Timur dari posisi tertinggi yang mana garis kemiskinan Halmahera Timur pada tahun 2017 sebesar Rp.509.725. Sementara itu Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 memiliki garis kemiskinan terendah

yaitu sebesar Rp.215.837. Perbedaan garis kemiskinan tersebut disebabkan oleh perbedaan harga komoditi dalam penghitungan garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, baik komoditi makanan maupun non makanan. Perkembangan garis kemiskinan menurut kabupaten/kota tersaji dalam Tabel L.1.

4.2. Jumlah Penduduk Miskin

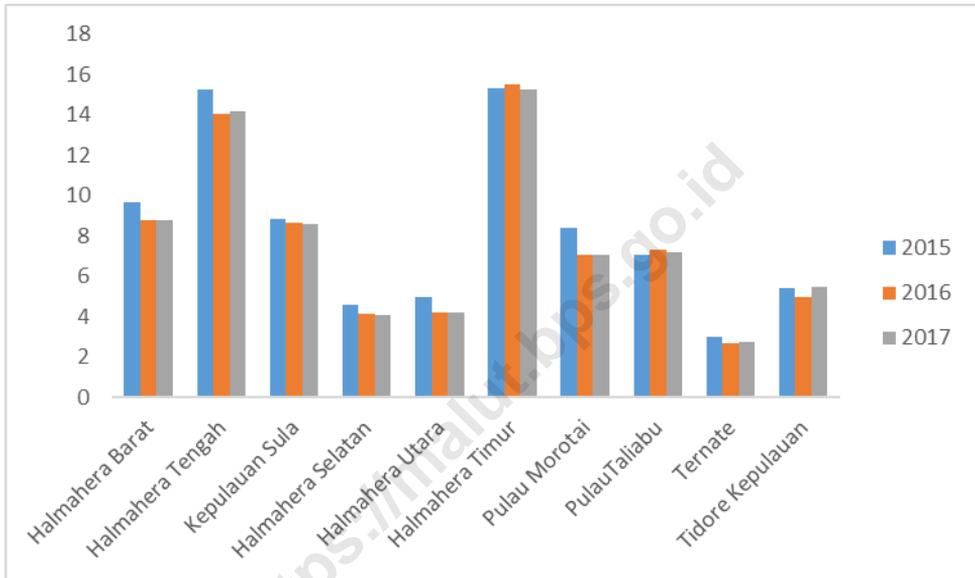
Perkembangan penduduk miskin Maluku Utara berdasarkan data Susenas dalam lima tahun terakhir relatif menunjukkan penurunan, baik dari jumlah maupun persentase. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin masih sekitar 85,60 ribu orang atau sebesar 7,64 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin turun menjadi 76,47 ribu orang atau sebesar 6,35 persen dari jumlah penduduk Maluku Utara.

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin



Gambar 4.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

(persen)

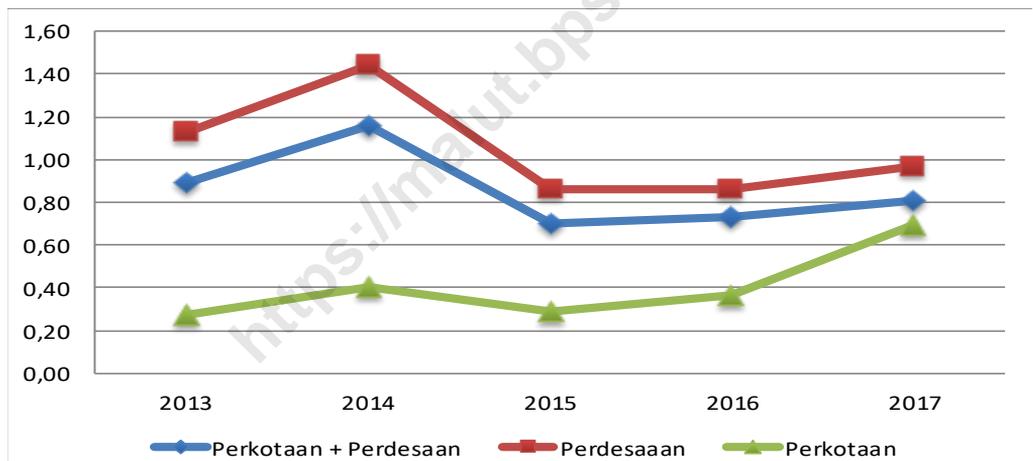


Seperti pada Gambar 4.4 , pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di kabupaten/kota di Maluku Utara cenderung mengalami penurunan, kecuali Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang naik. Pada Tahun 2017 Tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 15,25 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 14,25 persen. Sementara itu Kota Ternate memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 2,73 persen pada tahun 2017. Kemudian tingkat kemiskinan terendah berikutnya yaitu Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 4,10 persen dan Kabupaten Halmahera Utara sebesar 4,22 persen. (Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.2).

4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index = P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2013-2017

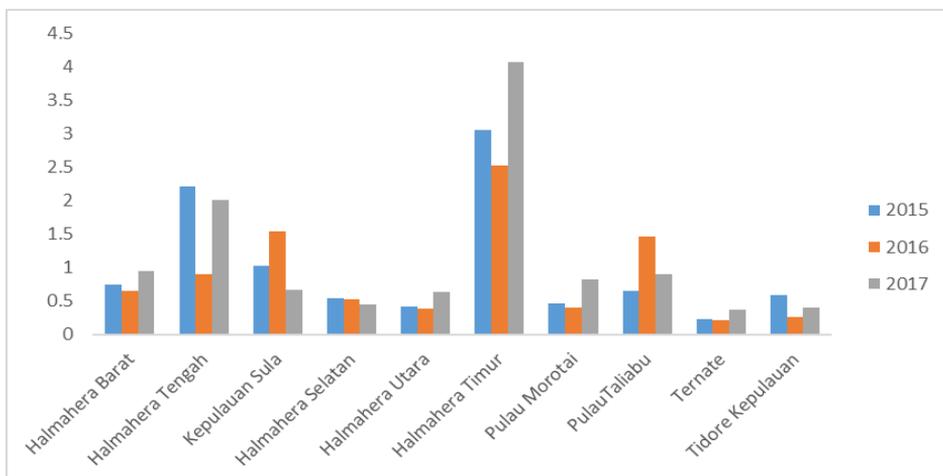


Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir bergerak fluktuatif dimana terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan diikuti penurunan yang juga signifikan pada tahun 2015. Pada tahun 2017 di daerah perkotaan, terjadi kenaikan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,323 poin menjadi 0,690 dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,367. Begitupula terjadi kenaikan P_1 di daerah perdesaan sebesar 0,111 poin menjadi

0,972 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,861. Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan secara keseluruhan (perkotaan dan perdesaan) pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,082 poin menjadi 0,810 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,728. (Selengkapnya dapat dilihat pada tabel L3).

Sementara itu pada Gambar 4.6. dapat dilihat perkembangan indeks kedalaman kemiskinan menurut Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 Kabupaten yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 4,07 sedangkan indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kota Ternate, yaitu sebesar 0,37. Hal ini mengindikasikan bahwa sedikit lebih sulit untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur daripada di Kota Ternate karena secara umum penduduk miskin di Halmahera Timur memiliki jarak yang cukup jauh di bawah garis kemiskinan. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.4).

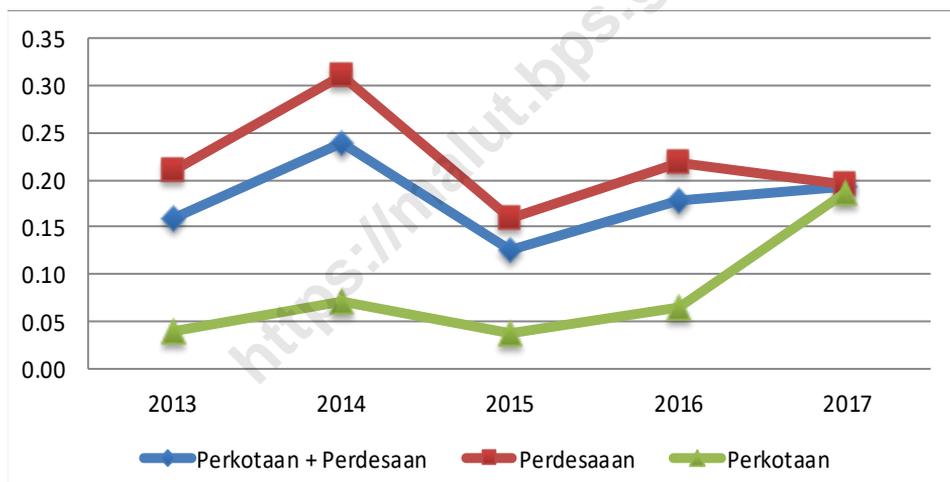
Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017



4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index = P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

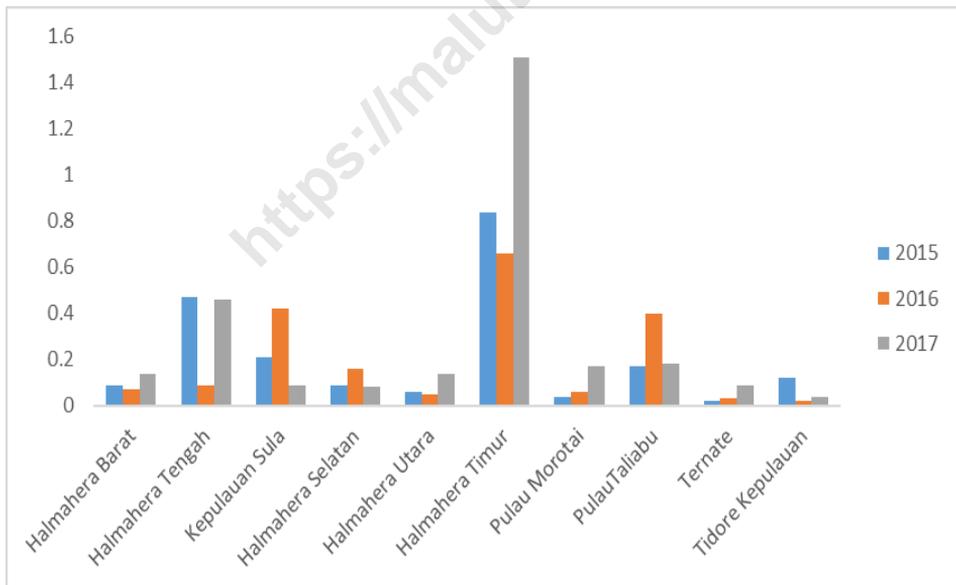
Gambar 4.7. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara Tahun 2013-2017



Pada Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara cenderung bergerak fluktuatif. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014, sedangkan penurunan indeks tersebut yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2017, indeks keparahan kemiskinan Provinsi Maluku Utara naik sebesar 0,015 menjadi 0,192 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,177.

Di daerah perkotaan, pada tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,123 menjadi 0,187 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,064. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan untuk daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,024 menjadi 0,194 dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,218. Hal tersebut menunjukkan bahwa meski secara umum terjadi peningkatan tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada tahun 2016, dan terjadi pula peningkatan ketimpangan di antara penduduk miskin itu sendiri. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.5).

Gambar 4.8. Perkembangan Indeks Keparahhan Kemiskinan Maluku Utara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017



Pada tingkat kabupaten/kota, indeks kedalaman kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota cenderung variatif. Sebagian kabupaten mengalami kenaikan sementara kabupaten lainnya mengalami penurunan.

Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa Kabupaten yang memiliki indeks keparahan kemiskinan yang tertinggi adalah Halmahera Timur yaitu sebesar 1,51, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Tidore Kepulauan, yaitu sebesar 0,04. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur lebih besar daripada di Kota Tidore Kepulauan karena distribusi pengeluaran penduduk miskin di Halmahera Timur lebih beragam. (Selengkapnya disajikan pada Tabel L.6).

<https://malut.bps.go.id>

BAB V

KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN DI MALUKU UTARA

Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Di samping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut.

Karakteristik rumah tangga miskin diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu. Selain itu juga diharapkan dapat mendukung usaha-usaha menurunkan kemiskinan agregat. Pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik sosial dan dimensi ekonomi penduduk miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien.

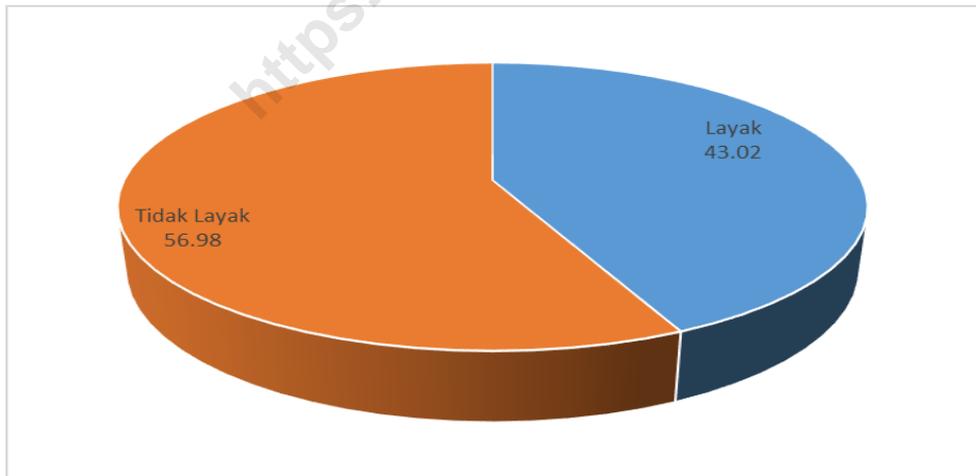
5.1. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

5.1.1. Air Layak

Air yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Air layak pada umumnya digunakan pada aktivitas minum dan memasak setiap rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan air yang layak dapat mendukung keberlangsungan hidup setiap rumah tangga.

Pada tahun 2017, penggunaan air layak oleh penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 43,02 persen. Sementara itu sebesar 56,98 persen penduduk miskin lainnya belum menggunakan air layak.

Gambar 5.1. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Air layak di Maluku Utara Tahun 2017



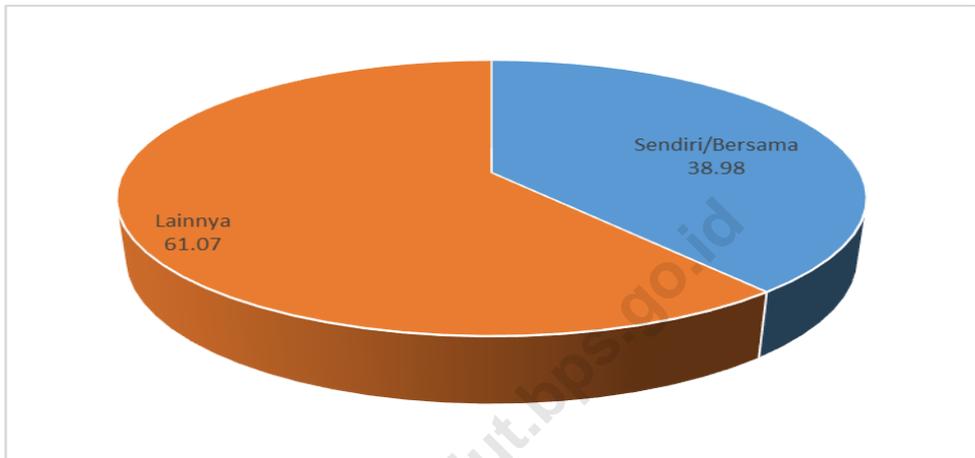
5.1.2. Jamban Sendiri/Bersama

Jamban merupakan salah satu sarana perumahan yang sedianya harus dimiliki oleh seluruh rumah tangga. Penggunaan jamban yang baik turut meningkatkan kesehatan setiap anggota rumah tangga. Sebaliknya penggunaan jamban yang tidak sesuai standar kesehatan akan berdampak buruk pada kesehatan anggota rumah tangga.

Penggunaan jamban di masyarakat terbagi menjadi jamban milik sendiri, jamban bersama yang digunakan secara terbatas oleh dua hingga empat rumah tangga saja, jamban umum yang diperuntukkan secara umum dan tidak memiliki jamban.

Penduduk miskin di Maluku Utara yang diketahui memiliki jamban sendiri/bersama pada tahun 2017 yaitu sebesar 38,93 persen. Sementara itu sebesar 61,07 persen penduduk menggunakan cara lainnya.

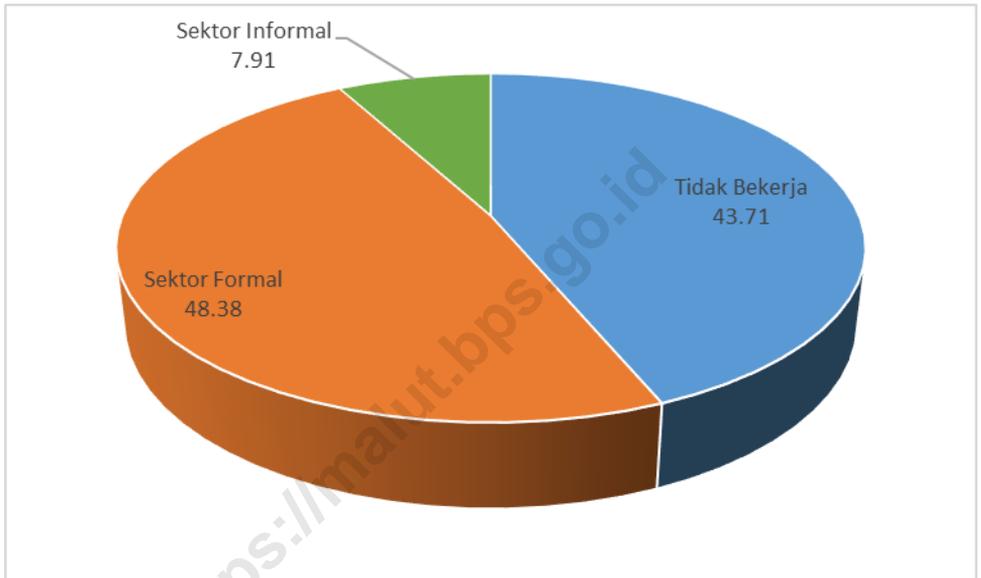
Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama di Maluku Utara Tahun 2017



5.2. Karakteristik Ketenagakerjaan

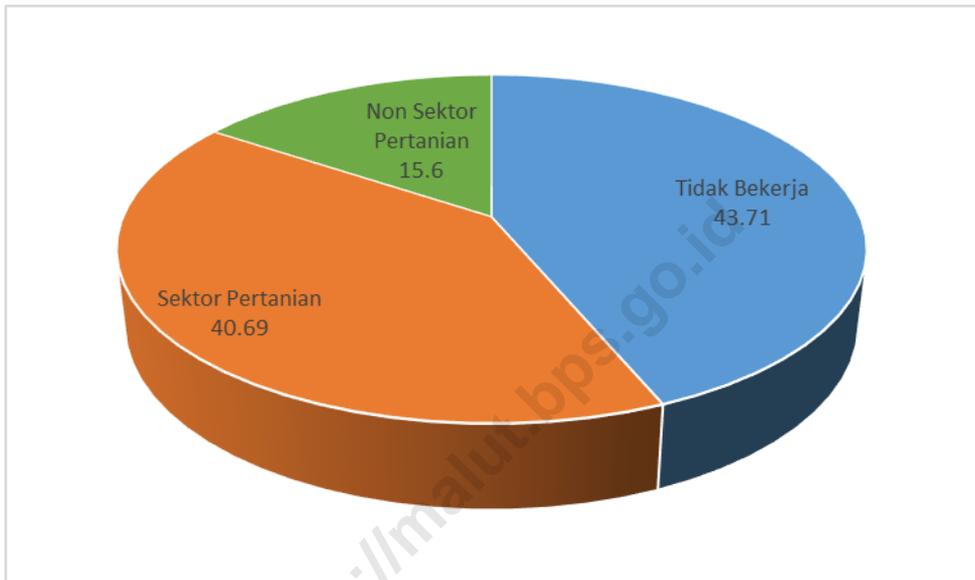
Status Bekerja menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Salah satu karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Profil orang miskin seringkali melekat pada mereka yang tidak bekerja atau mereka yang bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari kayu dan madu di hutan. Selain itu penduduk miskin juga cenderung memiliki status bekerja informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/keluarga atau pekerja bebas.

Gambar 5.3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Status Bekerja Tahun 2017



Pada gambar 5.3. terlihat bahwa sebesar 43,71 persen penduduk miskin usia 15 Tahun ke atas tidak bekerja. Angka tersebut termasuk penduduk yang berstatus pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sementara itu sebesar 48,38 persen penduduk miskin bekerja pada sektor informal. Kemudian sebesar 7,91 persen penduduk miskin bekerja pada sektor formal.

Gambar 5.4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas di Maluku Utara Menurut Sektor Bekerja Tahun 2017

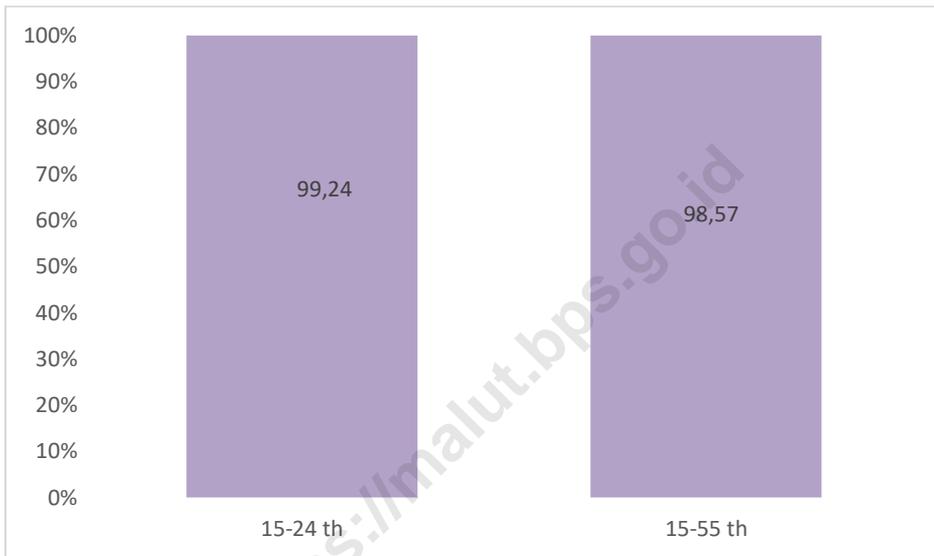


Kemudian berdasarkan gambar 5.4, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Maluku Utara pada tahun 2017 yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 40,69 persen. Sementara itu penduduk miskin yang bekerja bukan di sektor pertanian yaitu sebesar 15,60 persen. Data tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian atau tidak bekerja sama sekali.

5.3. Karakteristik Pendidikan

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan sangat penting. Orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih kecil menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah angka melek huruf (AMH) dan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 5.5. Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Miskin di Maluku Utara Tahun 2016

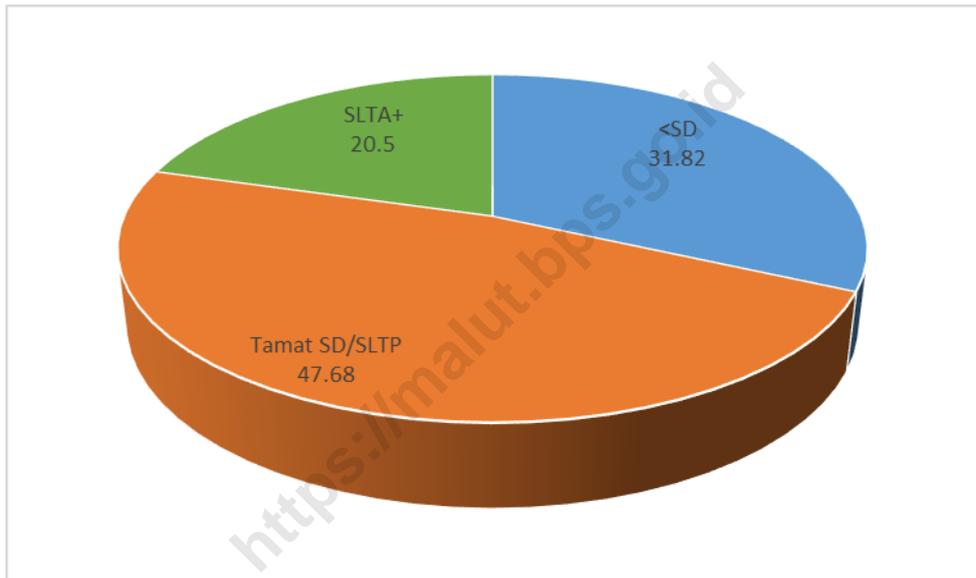


Angka melek huruf penduduk miskin menggambarkan proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Pada publikasi ini AMH dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok usia 15-24 tahun dan usia 15-55 tahun.

Dari gambar 5.5. dapat dilihat bahwa AMH penduduk miskin untuk kelompok 15-24 tahun yaitu 99,24, artinya diyakini bahwa sebagian besar penduduk miskin usia 15-24 tahun di Maluku Utara dapat membaca dan menulis dengan kalimat sederhana. Sementara itu untuk kelompok usia 15-55 tahun, AMH penduduk miskin yaitu sebesar 98,57. Artinya pada usia antara 25-55 tahun masih

terdapat penduduk miskin yang tidak dapat membaca dan menulis kalimat sederhana.

Gambar 5.6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Maluku Utara Tahun 2017

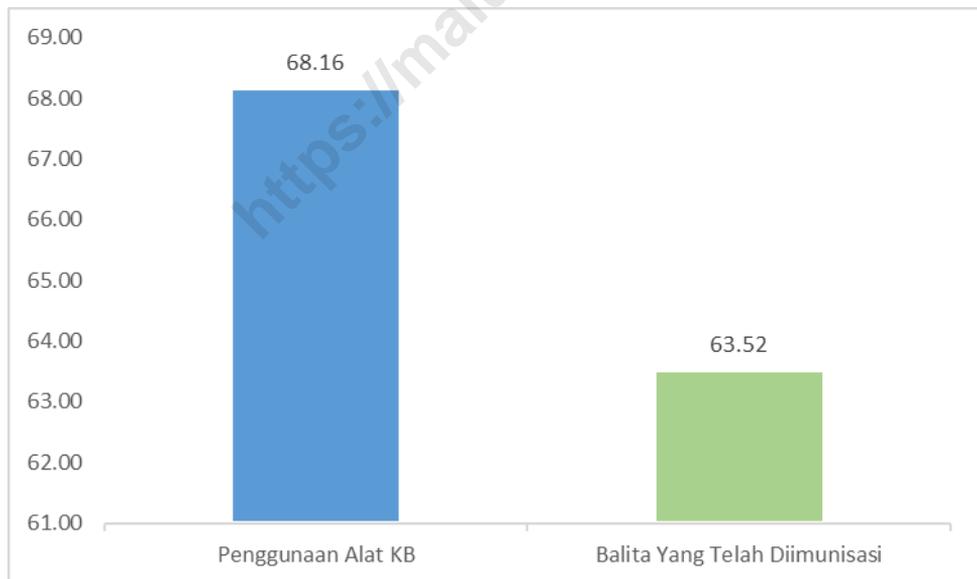


Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang paling banyak ditamatkan penduduk miskin adalah pendidikan dasar (SD atau SMP), yaitu sebesar 47,68 persen. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA ke atas yang ditamatkannya hanya sebesar 20,50 persen. Selain itu sebesar 31,82 persen penduduk miskin yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah bersekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin memiliki karakteristik pendidikan yang kurang baik atau rendah.

5.4. Karakteristik Kesehatan

Karakteristik kesehatan merupakan salah satu variabel sosial yang penting. Kesehatan merupakan keinginan setiap penduduk, tak terkecuali penduduk miskin. Pada publikasi ini terdapat dua indikator dari karakteristik kesehatan yang biasanya merupakan dasar pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Kedua indikator tersebut yaitu penggunaan alat kontrasepsi/keluarga berencana (KB) dan imunisasi balita.

Gambar 5.7. Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Alat KB dan Memiliki Balita yang Telah Diimunisasi di Maluku Utara Tahun 2017



Berdasarkan gambar 5.7 dapat diketahui persentase penduduk miskin yang menggunakan alat KB. Selain itu dapat pula diketahui persentase penduduk miskin memiliki balita yang telah diimunisasi.

Pada tahun 2017, penduduk miskin yang menggunakan alat KB untuk menunda kehamilan yaitu sebesar 68,16 persen. Hal itu berarti masih terdapat 31,84 persen penduduk miskin yang belum menggunakan alat KB.

Kemudian, penduduk miskin memiliki balita yang telah diimunisasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 63,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sudah sebagian besar penduduk miskin melakukan imunisasi kepada balita-balitanya di petugas kesehatan setempat. Namun, masih terdapat 36,48 persen penduduk yang belum melakukan upaya imunisasi pada balita mereka.

TABEL - TABEL

<https://malut.bps.go.id>

**Tabel L.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015-2017**

(dalam rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
Halmahera Barat	269.070	293.118	302.921
Halmahera Tengah	361.980	397.379	410.708
Kepulauan Sula	284.470	315.133	320.854
Halmahera Selatan	245.110	266.155	273.849
Halmahera Utara	195.090	208.832	215.837
Halmahera Timur	441.910	494.245	509.725
Pulau Morotai	211.630	229.343	236.532
Pulau Taliabu	286.370	331.968	342.401
Ternate	459.550	489.810	514.396
Tidore Kepulauan	340.910	368.796	387.307

**Tabel L.2.Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota,Tahun 2015 – 2017**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2016
(1)	(3)	(4)	(4)
Halmahera Barat	9,69	8,77	8,74
Halmahera Tengah	15,23	14,03	14,15
Kepulauan Sula	8,85	8,63	8,59
Halmahera Selatan	4,61	4,11	4,10
Halmahera Utara	4,99	4,19	4,22
Halmahera Timur	15,33	15,48	15,25
Pulau Morotai	8,39	7,08	7,07
Pulau Taliabu	7,04	7,29	7,17
Ternate	2,99	2,67	2,73
Tidore Kepulauan	5,38	4,96	5,45

Tabel L.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012 – 2017

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	0,08	1,14	0,85
2013	0,27	1,13	0,89
2014	0,40	1,44	1,16
2015	0,29	0,858	0,703
2016	0,367	0,861	0,728
2017	0,69	0,972	0,81

**Tabel L.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015 – 2017**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	0,75	0,66	0,95
Halmahera Tengah	2,21	0,90	2,01
Kepulauan Sula	1,02	1,54	0,67
Halmahera Selatan	0,54	0,53	0,45
Halmahera Utara	0,42	0,39	0,63
Halmahera Timur	3,06	2,52	4,07
Pulau Morotai	0,47	0,40	0,83
Pulau Taliabu*	0,65	1,46	0,90
Ternate	0,23	0,22	0,37
Tidore Kepulauan	0,59	0,26	0,40

**Tabel L.5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2012 – 2017**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	0,00	0,20	0,14
2013	0,04	0,21	0,16
2014	0,09	0,31	0,24
2015	0,036	0,16	0,126
2016	0,064	0,218	0,177
2017	0,187	0,194	0,192

**Tabel L.6 Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015 – 2017**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(4)
Halmahera Barat	0,09	0,07	0,14
Halmahera Tengah	0,47	0,09	0,46
Kepulauan Sula	0,21	0,42	0,09
Halmahera Selatan	0,09	0,16	0,08
Halmahera Utara	0,06	0,05	0,14
Halmahera Timur	0,84	0,66	1,51
Pulau Morotai	0,04	0,06	0,17
Pulau Taliabu	0,17	0,40	0,18
Ternate	0,02	0,03	0,09
Tidore Kepulauan	0,12	0,02	0,04

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik dan World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2018. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2017*. BPS: Jakarta

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2017. *Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2016*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. 2017. *Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Utara No. 40/07/82/Th.XV*. BPS Provinsi Maluku Utara: Ternate.

<https://malut.bps.go.id>

<http://malut.bps.go.id>

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA
STATISTICS OF MALUKU UTARA PROVINCE**
Jl. Stadion No. 65, Ternate 97712, Telp. (0921) 3127878/Fax (0921) 3126301
Homepage : <http://malut.bps.go.id> E-mail : bps8200@bps.go.id